

# Pelaksanaan Rencana Kerja DKED Bidang Pengembangan Usaha Kakao Kabupaten Sikka-NTT





Laporan Monitoring & Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Kerja DKED  
Bidang Pengembangan Usaha Kakao  
Kabupaten Sikka-NTT



FORDFOUNDATION



Kabupaten  
Sikka



# Daftar Isi

Kerjasama .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar dan Tabel .....	v
I.    Pendahuluan .....	1
II.   Struktur Organisasi Task Force DKED Kakao .....	3
III.  Program kerja DKED Sektor Kakao .....	5
IV.   Capaian kinerja DKED Sektor Kakao .....	5
V.    Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja .....	9
VI.   Penutup .....	9
A.  Kesimpulan .....	9
B.  Usulan Tindak Lanjut .....	9
VIII. Lampiran .....	10
Matriks Capaian Kinerja Semester I (Januari-Juni 2016) DKED, Kabupaten Sikka .....	10



# Daftar Gambar dan Tabel

Gambar 1. Struktur Organisasi DKED.....	2
Gambar 2. Struktur Organisasi <i>Task Force</i> Sektor Kakao .....	4
Tabel 1. Lembaga dalam struktur Organisasi DKED .....	4
Tabel 2. Program Kerja DKED .....	5
Tabel 3. Capaian Kinerja DKED .....	6
Tabel 4. Capaian Kinerja DKED berdasarkan masing-masing sektor .....	8





## I. Pendahuluan

Upaya pengembangan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di Kabupaten Sikka, NTT, melibatkan beragam *stakeholder*; Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, institusi agama, dll. Namun, selama ini setiap *stakeholder* masih fokus pada program masing-masing tanpa menjalin koordinasi dengan *stakeholder* lain. Kenyataan ini berdampak pada program-program yang saling tumpang tindih. Memang *stakeholders* pernah membuat forum koordinasi tetapi tidak bertahan lama (*unsustainability*) dan selalu berakhir bersamaan dengan program selesai.

Merujuk pada pengalaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Sikka membentuk Dewan Kerja Sama Ekonomi Daerah (DKED) pada tahun 2012. Pembentukan DKED bertujuan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serentak menjadi media-media komunikasi, koordinasi, advokasi, dan pembelajaran bagi para *stakeholder* yang berkecimpung pada bidang pengembangan ekonomi di Nian Tana Sikka. Sebagai media komunikasi dan koordinasi, DKED bukan implementor sehingga tidak memiliki program langsung di lapangan. DKED hanya memfasilitasi dan membantu kelancaran kegiatan di lapangan.

Adapun fungsi dan peran dari DKED secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pertemuan dengan masing-masing *stakeholder* yang ada di sektor tertentu atau lintas sektor.
2. Mendorong koordinasi kegiatan antarpemangku kepentingan yang ada di sektor tertentu.
3. Mendorong transfer pengetahuan,

informasi, dan pembelajaran baik (*best practice*) dalam bidang ekonomi.

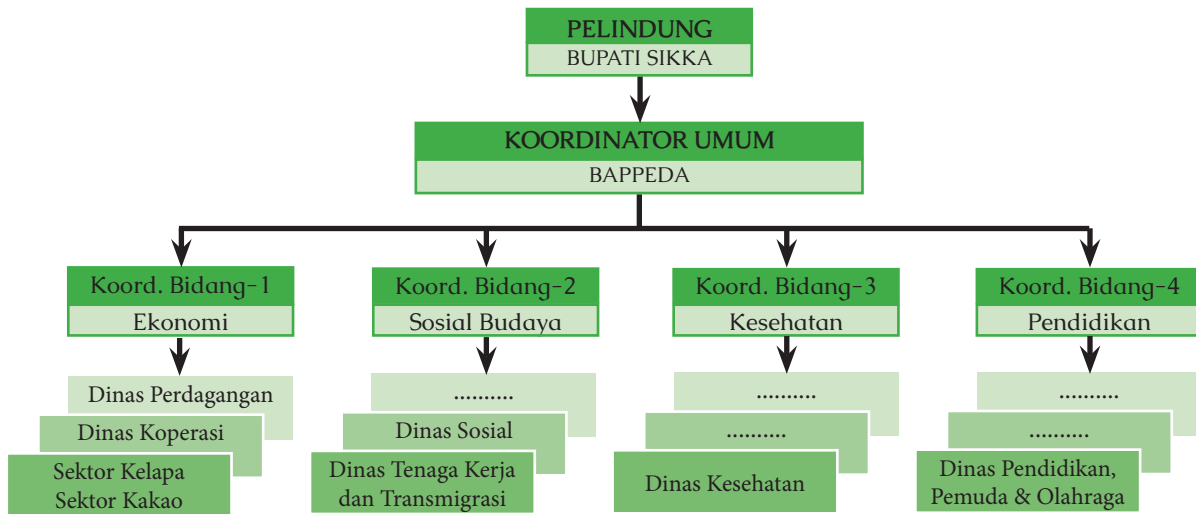
4. Memberikan masukan kepada pemerintah dan *stakeholder* lain terkait prioritas pengembangan ekonomi di Kabupaten Sikka.
5. Memberikan informasi terkait pengembangan ekonomi daerah.

Kelembagaan DKED dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sikka No.245/HK/2012 yang setiap tahun diperbarui secara reguler sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Ada dua SK dalam struktur DKED yaitu SK DKED dan SK *Task Force* Sektor. Salah satu SK *Task Force* yang sudah diterbitkan adalah “MPIG Ikat Tenun Sikka”. Sedangkan untuk SK Sektor Kakao masih dalam proses diskusi. Gambar 1. dihalaman berikutnya merupakan struktur organisasi DKED di Kabupaten Sikka.

DKED dikoordinasi langsung oleh Pemda Kabupaten Sikka untuk menjaga keberlanjutan lembaga ini. Untuk itu, setiap bidang dalam struktur organisasi dikoordinasi oleh SKPD terkait; Bidang Ekonomi menjadi koordinator bagi *stakeholders* pengembangan ekonomi; Bidang Kesehatan mengkoordinasi *stakeholder* yang bergerak di dunia kesehatan, dst. Sedangkan, *stakeholder* non-pemerintah seperti koperasi petani, LSM, lembaga keuangan, dan institusi swasta lain menempati struktur unit (*task force*) DKED.

Sebagai tahap awal, di bawah koordinasi Bagian Ekonomi Bappeda Kabupaten Sikka memilih kakao sebagai sektor pertama yang akan dikembangkan oleh DKED.

Gambar 1. Struktur Organisasi DKED



Sektor ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran dan model yang tepat untuk media koordinasi antar *stakeholder* di Kabupaten Sikka. Kakao dipilih karena menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Sikka. Pilihan ini menjadi sangat relevan ketika 60-70% dari tenaga kerja di Pulau Flores diserap oleh sektor pertanian.

Seperti daerah lain, sektor pertanian di Flores menghadapi berbagai kendala dan tantangan, seperti:

1. Produktivitas rendah bila dibandingkan dengan standar nasional dan internasional yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan petani tentang praktik-praktik pertanian modern dan teknologi untuk mengatasi hama dan penyakit, usia pohon yang sudah tua dan penurunan kadar tanah;
2. Rendahnya pasokan *input* pertanian yang sesuai dengan standar dan tidak sesuai dengan teknologi pengolahan;
3. Nilai tambah rendah: sebagian besar produk dijual sebagai produk mentah tanpa diolah terlebih dahulu secara lokal;
4. Infrastruktur (jalan, komunikasi) yang tidak memadai dan jauh dari/ke pasar lokal;
5. Kurangnya akses informasi.

Sikka merupakan salah satu kabupaten penghasil kakao terbesar di Flores. Budidaya kakao merupakan sumber mayoritas pendapatan rumah tangga (50-60% dari populasi) diikuti oleh kacang mete dan kelapa. Dari total rumah tangga di Sikka, 60% adalah petani dengan 83% dari petani kakao. Dengan kata lain, 50% dari total rumah tangga di Sikka adalah petani kakao dengan kepemilikan kebun kakao sekitar 0,5 hektar per rumah tangga.

Pada tahun 2009, produksi mencapai 6.409 ton yang tersebar di 21.657 ha lahan produktif. Berdasarkan data pemerintah, saat ini sekitar 57% adalah pohon produktif, 34% belum produktif dan 14% perlu direhabilitasi. Dari sisi pemasaran, Sikka memiliki keuntungan karena tempat produksi berada di sekitar pusat pasar dan perdagangan antarpulau di Flores, yaitu Kota Maumere dan pelabuhannya.

Dari tahun 2004 sampai 2006, produktivitas kakao di Flores menurun drastis dari 600 kg/ha menjadi sekitar 150 kg/ha, sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional 960 kg/ha. Akibatnya, pendapatan petani mengalami penurunan yang sangat drastis. Pendapatan petani kakao diperkirakan sekitar USD 330 per tahun. Artinya, setara dengan kurang

dari USD 1 per hari per-keluarga petani. Untungnya, petani kakao di Flores melakukan pertanian tumpang sari dengan berbagai pohon produktif lainnya (kelapa, pisang, pinang, dll) dan integrasi ternak. Banyak petani juga memiliki tanaman lain seperti kopi, sarung tangan, kemiri dan komoditas untuk swasembada seperti jagung, beras, dan singkong.

Salah satu penyebab produktivitas kakao menurun drastis ini adalah hama PBK yang tersebar secara meluas. Masalah ini berakar pada terbatasnya pengetahuan tentang praktik-praktik budidaya yang baik dan banyaknya pohon kakao yang sudah tua.

Terhadap persoalan ini, *stakeholders* kakao melakukan beragam upaya untuk memberantas hama dan penyakit kakao di Flores. Persoalannya, *best practice* di satu tempat belum tentu disebarluaskan atau dipraktikkan oleh petani kakao di daerah lain. *Cocoa Forum Flores* yang berpusat di Sikka dan *Cocoa Stakeholder Partnership (CSP)* yang berpusat di Makassar, sebenarnya sudah menunjukkan pembelajaran yang baik. Bahwa koordinasi baik dari semua *stakeholder* kakao mulai dari petani sampai dengan *buyer* adalah salah satu media sangat efektif khususnya dalam membantu meningkatkan pengetahuan petani yang bermuara pada peningkatan pendapatan petani itu sendiri. Pada akhirnya, bisa berkontribusi dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan.

Pembelajaran positif lain adalah kerjasama untuk pengembangan kakao di kabupaten Sikka di bawah koordinasi DKED dan didukung beberapa lembaga termasuk KPPOD dalam kurun tahun 2012 dan menghasilkan sejumlah point berikut:

1. Adanya program bersama antar *stakeholder* dalam pengembangan kakao di Kabupaten Sikka. Sejumlah LSM bergabung dengan pemerintah melakukan program bersama untuk peningkatan produksi kakao serta

penguatan organisasi petani;

2. Adanya peningkatan produktivitas dari 129 kg /0.25 ha/ tahun dibandingkan sebelum ada program hanya 96 kg/0.25 ha/ tahun. Artinya, ada peningkatan pendapatan sebesar 129% dari Rp 1.740.000,- pertahun/0.25 ha menjadi Rp 2.244.000,- pertahun/0.25 ha. (harga rata-rata 18.500);
3. Adanya *Cocoa Learning Center (CLC)* sebagai media pembelajaran bagi petani kakao dan media peningkatan kapasitas bagi fasilitator kakao. Saat ini sudah tergabung sekitar 100 orang fasilitator kakao yang berasal dari petani dan penyuluh pemerintah.

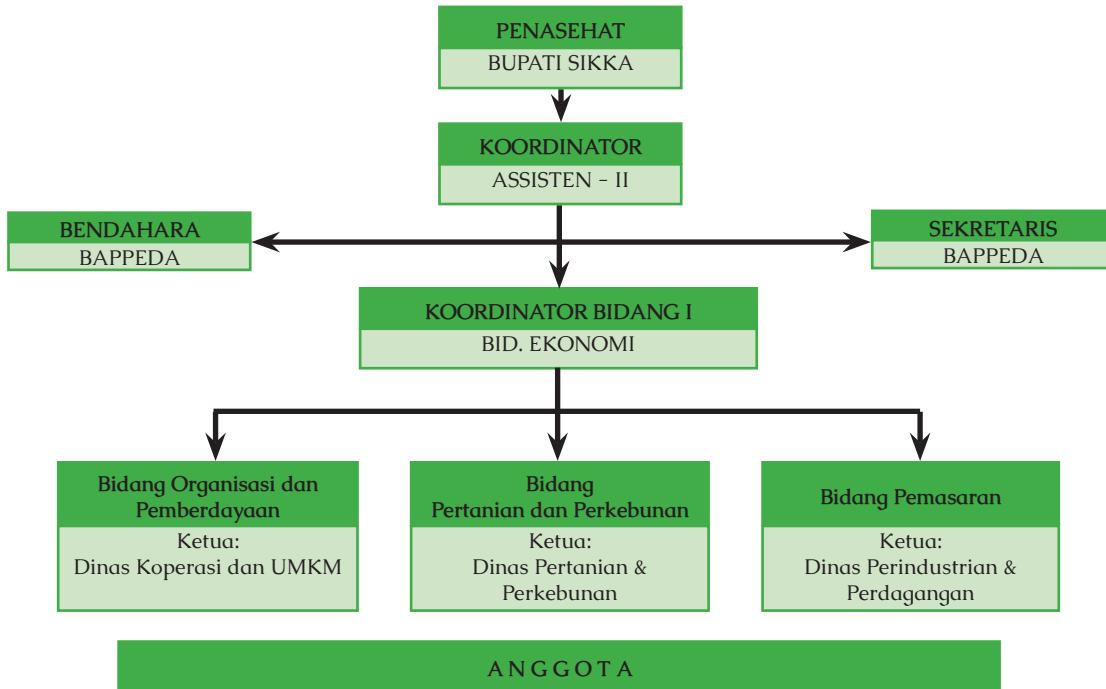
Namun, keberhasilan ini hanya dirasakan oleh sejumlah petani yang ikut dalam program. Berdasarkan evaluasi tahun 2015, walaupun hanya 10 % dari anggota menyatakan puas dengan program DKED, namun semua sepakat bahwa keberadaan DKED penting dan perlu ditingkatkan baik kinerja maupun organisasinya. Untuk itu, DKED sepakat untuk melanjutkan programnya dan meminta KPPOD untuk terus membantu dalam penguatan organisasi serta peningkatan kinerjanya sehingga bisa lebih bermanfaat bagi petani kakao di Kabupaten Sikka.

## II. Struktur *Task Force* DKED Kakao

Seperti struktur organisasi DKED induk, dalam struktur *Task Force* Kakao, SKPD teknis terkait memerankan posisi sebagai koordinator sedangkan *stakeholder* non-pemerintah semisal LSM, koperasi, dll, menempati posisi sebagai wakil. Gambar 2. Berikut adalah struktur organisasi *Task Force* untuk Sektor Kakao.

Keanggotaan *Taks Force* DKED sektor kakao adalah mulai dari kelompok tani sampai pelaku pasar. Saat ini ada sebanyak 23 lembaga yang dikategorikan dalam 6 kelompok organisasi, dapat di lihat pada Tabel 1. di halaman selanjutnya.

Gambar 2. Struktur Organisasi Task Force Sektor Kakao



Tabel 1. Lembaga dalam struktur Organisasi DKED

No	Kelompok	Lembaga
1.	Pemerintah	Dinas Pertanian, Dinas koperasi, Dinas perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Bappeda, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh - BKP2
2.	LSM	Sahabat Cipta, Veco Indoensia, YPMF, Caritas, Bangwita
3.	Lembaga keuangan	Bank BNI dan BRI, Koperasi Kredit Sube Huter, Koperasi Kredit Swadaya, Koperasi Kredit Pintu Air
4.	Media	Flores Pos dan Kupang Pos
5.	Koperasi Tani dan Kelompok Tani	KSU Pleapuli, KSU Koperasi Sudan Sogon, KSU Sube Huter
6.	Peneliti dan lembaga pelatihan	<i>Cocoa Learning Center</i> – CLC, Litbang Pertanian Kabupaten Sikka

### III. Program Kerja DKED Sektor Kakao

Program kerja DKED Sektor Kakao tercantum dalam Matriks Perencanaan Strategis 2015-2018 dan Rencana Kerja tahun 2015-2016 Pengembangan Kakao di Kabupaten Sikka. Program DKED tergambar jelas pada *Output* 5; Program-program DKED dikelola dengan baik. Sedangkan *Output* 1 sampai dengan *Output* 4 merupakan rencana kerja dari anggota-anggota DKED yaitu kegiatan yang dikelola dan dibiayai oleh Pemerintah daerah Sikka dan kegiatannya sudah diimplementasikan sesuai dengan rencana.

Perkembangan program kerja sesuai Renja yang sudah disusun sebagai jabaran Renstra DKED 2015-2018 dapat dilihat pada Tabel 2. berikut.

### IV. Capaian Kinerja DKED Sektor Kakao

Walaupun DKED belum sempurna dan masih membutuhkan pendampingan khususnya dalam penataan organisasi, tetapi sudah menunjukkan hasil dan pembelajaran-pembelajaran positif yang tertuang dalam Tabel 3. di halaman selanjutnya yakni capaian kinerja DKED.

Adapun hasil monitoring di lapangan dari Rencana Kerja DKED yang dilaksanakan oleh masing-masing DKED dapat di lihat pada Tabel 4. yang tertera di halaman selanjutnya yakni capaian kinerja DKED berdasarkan masing-masing sektor.

Tabel 2. Program Kerja DKED

Program-program DKED dikelola dengan baik		
No.	Program Kerja	Indikator
1.	Melaksanakan pertemuan rutin setiap dua bulan	Tersedia Laporan Hasil Pertemuan dan Tindak Lanjut
2.	Menyiapkan payung hukum kelembagaan DKED	SK/Perbup tentang Organisasi dan Tata Kerja DKED
3.	Menyusun Renja DKED	Tersedia Renja DKED
4.	Menyepakati metode pengumpulan data mengenai kakao di lapangan (termasuk cakupan, frekuensi dsb)	Tersedia dokumen kesepakatan DKED tentang metode & instrumen pengumpulan data kakao
5.	Merumuskan AD/ART DKED	AD/ART DKED Tersedia
6.	Melaksanakan rapat evaluasi tahunan dan perencanaan tahun berikutnya	Tersedia dokumen evaluasi tahunan dan Rencana Tahun berikutnya
Program-program Lain di luar Renja		
No.	Program Kerja	Indikator
1.	Melakukan networking dengan Cacao Sustainability Partnetship (CSP) dan Pelaku kakao di tingkat nasional dan wilayah lain	Minimum 3 kali pertemuan dihadiri oleh CSP dan informasi yang diperoleh didistribusikan ke anggota

Tabel 3. Capaian Kinerja DKED

PROGRAM-PROGRAM DKED DIKELOLA DENGAN BAIK	
No.	Program Kerja dan Pencapaian
1.	<p><b><u>Melaksanakan pertemuan rutin setiap dua bulan</u></b></p> <p>Tahun ini hanya dilakukan pertemuan selama 2 kali yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pertemuan koordinasi antarlintas sektor yang dihadiri oleh semua stakholder yang ada di Kabupaten Sikka yang bergerak di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Tujuan pertemuan ini, selain untuk mendapat informasi perkembangan program pengembangan masyarakat di Kabupaten Sikka, juga pembelajaran bagi setiap sektor untuk bisa saling mendukung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>2) Pertemuan yang difasilitasi oleh KPPOD khusus untuk menggali perkembangan dari kegiatan DKED serta mendapat masukan tentang pendampingan DKED untuk masa yang akan datang. Beberapa diskusi kecil di sekretariat DKED yaitu untuk membahas rencana pertemuan DKED, mengaktifkan kembali koordinasi meeting antara kabupaten yang ada di Flores, serta wacana mengalihkan kesekretarian DKED <i>Task Force</i> Kakao ke <i>Cocoa Learning Center</i> (CLC). Beberapa kali pertemuan koordinasi program dari lembaga yang mempunyai program bersama untuk pengembangan kakao dari yang didukung oleh MCAI dan Swisscontact yaitu VECO Indonesia, Caritas, YPMF dan Bangwita.</li> </ol> <p>Fungsi DKED sebagai media untuk koordinasi dan bekerjasama dalam pengembangan kakao di Kab. Sikka dan kabupaten lainnya sudah berjalan sesuai dengan fungsinya. DKED sudah dimanfaatkan oleh sejumlah lembaga atau pihak luar yang bermaksud mengimplementasikan program kakao di Kab. Sikka. Salah satunya adalah program pengembangan kakao oleh <i>Swisscontact</i> yang didanai oleh MCAI dan dilaksanakan oleh Veco Indonesia, dimana dalam implementasinya sudah melibatkan stakeholder yang ada di Pokja DKED sektor kakao. Sahabat Cipta mengambil peran dalam beberapa kegiatan dari Renja pengembangan kakao oleh pemerintah khususnya penguatan organisasi bisnis petani (Koperasi), akses pasar dan penguatan organisasi CLC.</p>
2.	<p><b><u>Menyiapkan payung hukum kelembagaan DKED</u></b></p> <p>Sudah ada SK Bupati di tahun 2016 No. 167/HK/2016 tentang Dewan Kerjasama Ekonomi Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016. Dan untuk mendorong kemandirian dari DKED Task Force kakao akan diterbitkan secara terpisah SK DKED Task Force Kakao.</p>
3.	<p><b><u>Menyusun Rencana Kerja DKED</u></b></p> <p>Masih dalam agenda</p>

4.	<p><b><u>Menyepakati metode pengumpulan data mengenai kakao di lapangan (termasuk cakupan, frekuensi dsb)</u></b></p> <p>Masih dalam agenda. Hasil diskusi dengan kesekretariatan; metode bagaimana anggota DKED bisa memberikan informasi secara rutin tentang perkembangan programnya kepada sekretariat DKED. Sedangkan metode pengumpulan langsung di lapangan akan langsung dilakukan dan dengan metode yang sudah ditetapkan oleh lembaga implementor masing-masing, tidak dilakukan oleh DKED.</p>
5.	<p><b><u>Merumuskan AD/ART DKED</u></b></p> <p>Masih dalam agenda</p>
6.	<p><b><u>Melaksanakan rapat evaluasi tahunan dan perencanaan tahun berikutnya</u></b></p> <p>Masih dalam perencanaan. Sudah disusun ToR pertemuan dan didistribusikan ke sejumlah anggota DKED</p>

**PROGRAM-PROGRAM LAIN**

No.	Program Kerja dan Pencapaian
1.	<p><b><u>Melakukan networking dengan Cacao Sustainability Partnetship (CSP), Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan pelaku kakao di tingkat nasional maupun di wilayah lain</u></b></p> <p>Networking dengan Kakao Forum Nasional (CSP). 4 kali pertemuan CPS dihadiri, dimana satu kali dihadiri oleh sekretariat DKED dan 3 kali dihadiri oleh anggota DKED seperti Cacao Learning Center dan Sahabat Cipta. Dampak dari keaktifan DKED di forum nasional adalah DKED Pokja Sektor kakao sudah diakui keberadaanya oleh Kakao Forum Nasional Nasiona. Empat kali pertemuan dihadiri CSP oleh DKED. Keaktifan DKED di forum nasional juga sudah memberikan dan memperkaya model forum pengembangan kakao di Indonesia. DKED hanya ada di Kabupaten Sikka, sedangkan di daerah lain, forum kebanyakan langsung diorganisir oleh pihak swasta atau bukan pemerintah. Adanya komitmen dari CSP untuk membantu meningkatkan kapasitas organisasi DKED.</p> <p>Networking dengan Pemerintah Propinsi NTT. DKED sudah mendapat pengakuan dari Biro Ekonomi Setda Propinsi NTT, dimana DKED adalah salah satu model tepat untuk media koordinasi di tingkat daerah. Salah satu masukan dari propinsi adalah mereplikasi model DKED Task Force kakao untuk sektor yang lain dan diharapkan DKED bisa lebih meningkatkan komunikasi lintas sektor.</p>

Tabel 4. Capaian Kinerja DKED berdasarkan masing-masing sektor

Modal untuk pembelian alat pemeliharaan tersedia bagi petani melalui Kelompok Tani atau Koperasi		
No.	Mitra yang Terlibat	Capaian dan Dampak
1.	Melakukan analisis kebutuhan (merupakan bagian dalam penyusunan proposal pengajuan dana)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sahabat Cipta sebagai pen-dampaing dalam penyusunan proposal dari Koperasi dan ana-lisa kebutuhan pasar.</li> <li>❖ Koperasi sebagai target yang menerima bantuan dari Pemer-intah Daerah Kab. Sikka.</li> <li>❖ Pemda sebagai pemilik program dan penyediaan pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tersusunnya proposal untuk pengua-tan kapasitas dari koperasi kakao KSU Pleapuli. Dimana pengembangan ber-dasarkan kebutuhan pasar yang ada.</li> <li>❖ Hasil analisis pasar teridentifikasinya buyer kakao yaitu PT, Jabat Rasa Flores, PT. Kampung Kearifan Indonesia, EC-COM, Mr. Sandi dan Comextra Majora. Kualitas kakao yang dibutuhkan adalah kakao dengan kualitas fermentasi dan non-fermentasi dengan standar SNI.</li> </ul>
2.	Melakukan koordinasi dengan penyandang dana/pemilik modal	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Sahabat Cipta sebagai pen-dampaing untuk pasca panen dan akses pasar.</li> <li>❖ Koperasi sebagai target yang menerima bantuan dari Pemer-intah Daerah Kab. Sikka.</li> <li>❖ Pemda sebagai pemilik program dan penyediaan pembiayaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tersedianya dana sebesar Rp 200.000.000,- bersumber dari dana APBN yang diperuntukan untuk pembangu-nan gedung koperasi sebesar 190 juta, pengadaan peralatan fermentasi dan penambahan modal kerja sebesar 10 juta.</li> <li>❖ Setelah ada perbaikan dan penambahan modal, pembelian bulan April – Juni 2016 (panen pertama) Koperasi Kakao Pleapu-li sudah melakukan penjualan sebanyak 26 ton biji kakao, meningkat sebesar 60% dibandingkan sebelum ada penambahan modal yaitu hanya mencapai 20 tons saja.</li> <li>❖ Manfaat petani kakao dengan adanya peningkatan kapasitas dari Koperasi adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Meningkatnya jumlah peluang petani untuk menjual biji kakai ke Koperasi Pleapuli yaitu meningkat sebesar 37% dari sebesar 615 petani menjadi 902 petani untuk periode 3 bulan 2016.</li> <li>● Harga lebih tinggi dibandingkan dengan menjual ke pedangan desa atau pedangan lokal yaitu selisi sebesar Rp. 2.645.000,- per-kg. Di-mana harga perdagangan lokal sebe-sar Rp. 28.500,- per-kg dan harga di Koperasi Pleapuli Rp. 31.145,-</li> </ul> </li> </ul>



## V. Hambatan Pelaksanaan Rencana Kerja

Walaupun koordinasi antar *stakeholder* berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, seperti:

1. Ada restrukturisasi dari Pemerintah Kabupaten Sikka dan juga adanya tugas rutin yang cukup padat dari kesekretariatan termasuk di SKPD, Musrenbang dan anggota lainnya, menyebabkan tertundanya pertemuan rutin dari DKED, termasuk penyusunan AD/ART.
2. Terbatasnya kewenangan kewenangan dari sekretariat DKED untuk melakukan kegiatan rutin sehingga tidak bisa mengambil inisiatif banyak terhadap implementasi renjanya secara leluasa.

## VI. Penutup

### Kesimpulan:

1. Meskipun tidak semua renja yang sudah disusun pada tahun 2015 dapat diimplementasikan, DKED telah menunjukkan pembelajaran positif dan mencapai hasil yang baik. Ada peningkatan koordinasi antar lembaga dan saling memanfaatkan sumberdaya yang ada di lembaga anggota DKED;
2. Dari sisi target penerima manfaat yaitu petani kakao. DKED secara tidak langsung sudah memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani seperti dalam contoh kasus penguatan organisasi petani;
3. Dari sisi model kelembagaan, model koordinasi seperti DKED *Task Force*

Sektor Kakao sudah memberikan pembelajaran positif dalam menjalin koordinasi, tukar-menukar informasi dan kerjasama dalam pengembangan program. Kesuksesan ini direplikasi ke sektor kedua yaitu untuk DKED *Task Force* Tenun Ikat yang ditetapkan pada Tahun 2015;

### Usulan Tindak Lanjut :

1. Restrukturisasi DKED *Task Force* Kakao. Kesekretariatan dipindahkan ke lembaga lain yang lebih fleksible dan berkelanjutan. Berdasarkan diskusi, CLC adalah organisasi yang tepat untuk mengambil alih fungsi dari kesekretariatan DKED. Meski demikian, sekretariat DKED tetap menjadi wahana yang berfungsi sebagai media koordinasi lintas sektor;
2. Penyusunan AD/ART serta mendorong penetapan SK untuk DKED sektor kakao;
3. Menyusun program kerja DKED;
4. Menyusun metodologi pengumpulan informasi dari anggota DKED ;
5. Menyusun metodologi distribusi informasi ke petani;
6. Mendorong pemerintah, supaya DKED *Task Force* Kakao dilibatkan dalam diskusi dan penyusunan program pengembangan kakao di kabupaten Sikka;
7. Mendorong DKED untuk memperkuat *networking* dengan *Cocoa Forum* Nasional;
8. Memperluas jaringan keanggotaan DKED; ■

## Matriks Capaian Kinerja Semester I (Januari–Juni 2016) DKED, Kabupaten Sikka

Output 1: Penyuluhan tentang “cara-cara dan manfaat P3S” telah dilaksanakan oleh PPL dan Petani Kader

No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2015		2016									Keterangan	Capaian	
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8			9
1.1	Membuat rencana penyuluhan P3S	1. BKP2 2. Distanbun 3. Dishut (BPK)	Tersedia rencana penyuluhan P3S														Setiap tahun di bulan Januari dan Februari selalu membuat rencana kerja terasuk untuk penyuluhan P3S
1.2	Melaksanakan pelatihan penyegar bagi penyuluh dan petani kader dalam bidang P3S khususnya yang berhubungan dengan kakao lestari	1. BKP2 2. Distanbun 3. Dishut (BPK)	penyuluh dan petani kader terlatih dalam bidang P3S														Telah dilaksanakan ditahun 2016. Pelatihan penyuluh swadaya, dan penyuluh PNS pada bulan Juni 2016. Penyuluh swadaya terdiri dari 45 petani yang sudah terlatih.
1.3	Menyediakan seperangkat alat peraga P3S bagi penyuluh dan petani kader	Distanbun	alat peraga bagi penyuluh dan petani kader tersedia														<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bulan Agustus kami sedang proses untuk menyediakan video tentang proses persiapan hingga pasca panen kakao.</li> <li>• Saat ini sedang dilakukan analisis ekonomi capaian hasil kakao dengan pendapatan yang dihasilkan.</li> <li>• 2-3 tahun terakhir petani mendapat 1 perangkat alat untuk 1 ha kebun.</li> </ul>

Output 1: Penyuluhan tentang “cara-cara dan manfaat P3S” telah dilaksanakan oleh PPL dan Petani Kader																		
No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2015						2016						Keterangan	Capaian	
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1.4	Melaksanakan penyuluhan sesuai dengan rencana	1. BKP2 2. Distanbun 3. Dishut (BPK)	Setiap petani telah menerima penyuluhan “Cara-cara dan manfaat P3S”														Penyuluhan disesuaikan dengan kalender musim	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah dilakukan penyuluhan sesuai rencana. Melakukan field trip ke petani yang sukses. 1 desa 1 penyuluh.</li> <li>Mengangkat petani yang sukses di desa menjadi penyuluh swadaya dengan gaji Rp. 500.000 – 600.000</li> </ul>
1.5	Mengevaluasi laporan pelaksanaan penyuluhan secara periodik	1. BKP2 2. Distanbun 3. Dishut (BPK)	Laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan tersedia															
Output 2: Alat-alat pemeliharaan tersedia bagi petani melalui Kelompok Tani/Koperasi																		
No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2015						2016						Keterangan	Capaian	
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
2.1	Menetapkan spesifikasi dan jumlah alat-alat pemeliharaan P3S yang diperlukan petani	1. Distanbun 2. Dinas kopersi	Tersedia Laporan jumlah dan spesifikasi alat pemeliharaan bagi petani															Sudah ada daftar alat pemeliharaan kebun kakao yaitu gunting pangkas, gunting galah dan pisau okulasi.

Output 2: Alat-alat pemeliharaan tersedia bagi petani melalui Kelompok Tani/Koperasi

No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2016												Keterangan	Capaian
				2015						2016							
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2.2	Mempersiapkan tatacara, administrasi dan melaksanakan pengadaan alat-alat pemeliharaan P3S.	1. Distanbun 2. Dinas koperasi	Tersedianya tatacara, administrasi dan terlaksananya pengadaan alat-alat pemeliharaan P3S														Pembagian diputuskan melalui kelompok kerja tidak perorangan
2.3	Menetapkan tatacara, dan melaksanakan distribusi alat-alat pemeliharaan P3S kepada Petani	1. Distanbun 2. Dinas kope-rasi	Tersedianya tatacara dan terlaksananya distribusi alat-alat pemeliharaan P3S														Sebagai tahap awal sudah kepada 40 kelompok petani dengan jumlah rata-rata per kelompok 25 orang
2.4	Melaksanakan evaluasi pengadaan serta menyusun dan menyerahkan laporan pengadaan alat-alat pemeliharaan P3S kepada pihak terkait	1. Distanbun 2. Dinas kope-rasi	Terlaksananya evaluasi serta tersusunnya laporan pengadaan alat-alat pemeliharaan P3S kepada pihak terkait														Tetap berjalan, yang belum berjalan adalah duduk bersama dengan NGO, apa saja yang sudah dilakukan.

Output 3: Modal untuk pembelian alat pemeliharaan tersedia bagi petani melalui Kelompok Tani/Koperasi

No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2016												Keterangan	Capaian
				2015						2016							
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
3.1	Melakukan analisa kebutuhan (merupakan bagian dalam penyusunan proposal pengajuan dana)	1. Distanbun 2. Dinas kope-rasi	Tersedianya rincian kebutuhan petani dalam proposal														Tersusunnya proposal untuk pengembangan kapasitas koperasi pleapuli

Output 3: Modal untuk pembelian alat pemeliharaan tersedia bagi petani melalui Kelompok Tani/Koperasi																
No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2015			2016						Keterangan	Capaian		
				10	11	12	1	2	3	4	5	6			7	8
3.2	Melakukan koordinasi dengan penyandang dana/pemilik modal	1. Distanbun 2. Dinas kope-rasi	Terlaksananya koordinasi dengan pemilik modal												Total dana yang disetujui Rp 200 juta, dimana 190 juta untuk pembangunan gedung koperasi & peralatannya dan 10 juta untuk tambahan modal kerja	
Output 4: Penyuluhan tentang cara-cara pembuatan pupuk organik, pestisida nabati, dan sarungnisasi swadaya dilaksanakan dengan baik oleh PPL dan Petani Kader																
No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2015			2016						Keterangan	Capaian		
				10	11	12	1	2	3	4	5	6			7	8
4.1	Membuat rencana penyuluhan cara-cara pembuatan pupuk organik, pestisida nabati, dan sarungnisasi	Distanbun	Tersedia rencana penyuluhan Pembuatan Pupuk Organik, pestisida nabati, dan sarungnisasi													Untuk pembuatan pupuk organik membutuhkan biaya dan investasi yang cukup besar seperti mesin chopper, dll. Sehingga Pemda memutuskan hanya membuat perencanaan sebagai uji coba saja yang dilakukan bersama kelompok tani kecil dan CLC
4.2	Melaksanakan pelatihan penyegaran bagi penyuluh dan petani kader dalam cara-cara pembuatan pupuk organik, pestisida nabati, dan sarungnisasi	Distanbun	penyuluh dan petani kader terlatih dalam bidang Pembuatan Pupuk organik, pestisida nabati, dan sarungnisasi													Belum dilaksanakan, karena masih terbatas dengan biaya untuk pengadaan alat dan biaya lainnya.

Output 4: Penyuluhan tentang cara-cara pembuatan pupuk organik, pestisida nabati, dan sarungnisi swadaya dilaksanakan dengan baik oleh PPL dan Petani Kader																
No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2015			2016						Keterangan	Capaian		
				10	11	12	1	2	3	4	5	6			7	8
4.3	Menyediakan seperangkat alat peraga cara-cara pembuatan pupuk organik, pestisida nabati, dan sarungnisi bagi penyuluh dan petani kader	Distanbun	Alat peraga bagi penyuluh dan petani kader tersedia												Akan dilaksanakan Tahun 2016	
4.4	Melaksanakan penyuluhan sesuai dengan rencana	Distanbun	Setiap petani telah menerima penyuluhan "Cara-cara Pembuatan pupuk organik, pestisida nabati, dan sarungnisi"													Akan dilaksanakan Tahun 2016
4.5	Mengevaluasi laporan pelaksanaan penyuluhan secara periodik	Distanbun	Laporan evaluasi pelaksanaan penyuluhan tersedia.													Akan dilaksanakan Tahun 2016
Output 5: Program-program DKED dikelola dengan baik																
No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2015			2016						Keterangan	Capaian		
				10	11	12	1	2	3	4	5	6			7	8
5.1	Melaksanakan pertemuan rutin setiap dua bulan	Paul Prasetya & Yos H. Beguir (Bappeda)	Tersedia Laporan Hasil Pertemuan dan Tindak Lanjut													Tidak pernah dilakukan khusus untuk kakao. Hanya beberapa NGO yang punya kepentingan dengan kegiatan ini.

Output 5: Program-program DKED dikelola dengan baik																		
No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2016												Keterangan	Capaian	
				2015	2016													
				10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
5.1																	kemudian Bappeda menginformasikan. Semester ini baru dilakukan 2 kali. Komoditas yang lain sudah rutin, seperti ikat tenun setiap bulan dilakukan. Kendala: di Bappeda terdapat tugas rutin yang cukup padat seperti musrenbang SKPD dll. Biasanya jika ada kebutuhan untuk koordinasi dari NGO. Seperti caritas dan VEVO.	
5.2	Menyiapkan payung hukum kelembagaan DKED	Paul Prasetya dan Yos H. Beguir (Bappeda) dan Silvanus Yanton (Bagian Hukum)	SK/Perbup tentang Organisasi dan Tata Kerja DKED														Sudah ada SK Bupati di tahun 2016 yang harus tetap dijaga setiap tahun	
5.3	Menyusun Renja DKED	BAPPEDA	Tersedia Renja DKED														Masih dalam perencanaan	
5.4	Menyepakati metode pengumpulan data mengenai kakao di lapangan (termasuk cakupan, frekuensi dsb)	DKED, Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	Tersedia dokumen kesepakatan DKED tentang metode & instrumen pengumpulan data kakao														Sudah ada database dan proses pendataan oleh BKP3 dan Dishutbun	

Output 5: Program-program DKED dikelola dengan baik																	
No.	Kegiatan/Sub-Kegiatan	Penanggung jawab	Hasil Kegiatan	2015			2016						Keterangan	Capaian			
				10	11	12	1	2	3	4	5	6			7	8	9
5.5	Merumuskan AD/ART DKED	BAPPEDA	AD/ART DKED Tersedia													Masih dalam perencanaan	
5.6	Melaksanakan rapat evaluasi tahunan dan perencanaannya tahun berikutnya	BAPPEDA	Tersedia dokumen evaluasi tahunan dan Rencana Tahun berikutnya														Dokumen diserahkan kepada pihak-pihak terkait







**Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah**

Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980  
Telp.: (021) 83780642/53, Fax.: (021) 83780643, Website: [www.kppod.org](http://www.kppod.org), Email: [kppod@kppod.org](mailto:kppod@kppod.org), Facebook: kppod